



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK TERDAPAT DAN/ATAU TIDAK MENGUASAI DATA/DOKUMEN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PRINTOUT RIWAYAT TRANSAKSI E-PURCHASING**
Nomor : 17 /PPID/VII/DP3APPKB/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SURYANTO, AKS.,M.Si**
NIP : 19730108 199403 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I (IV/b)
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap arsip, dokumen administrasi, serta data yang tersedia dan/atau berada dalam penguasaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terdapat dan/atau tidak dikuasai oleh Dinas data/dokumen sebagaimana dimaksud dalam instrumen monitoring/evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terkait Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025, khususnya dokumen pengadaan melalui e-Purchasing/Katalog Elektronik.

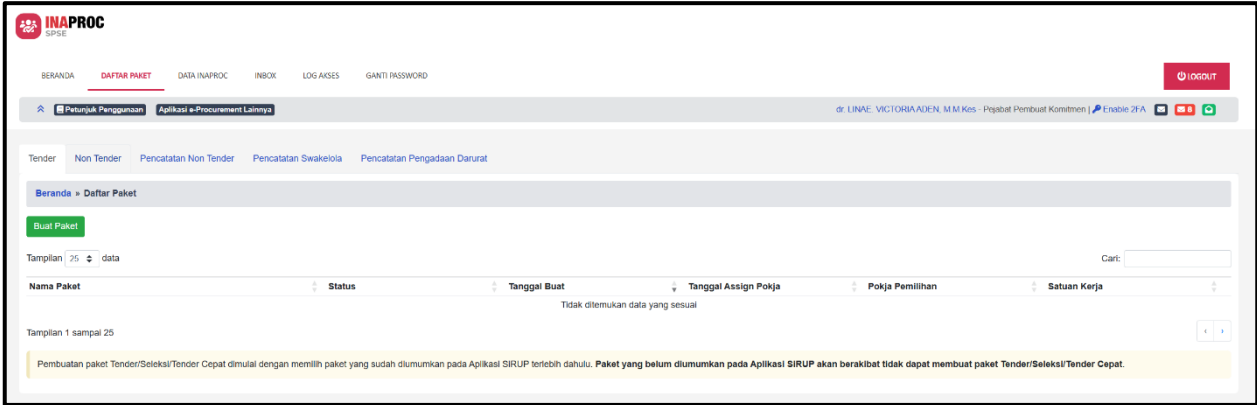
Adapun rincian data/dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

NO.	TAHAPAN/JENIS DOKUMEN YANG DIMINTA	STATUS DATA/DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Printout Riwayat Transaksi e- Purchasing	Tidak terdapat/tidak dikuasai	Tidak terdapat printout riwayat transaksi yang sesuai dengan kriteria permintaan.

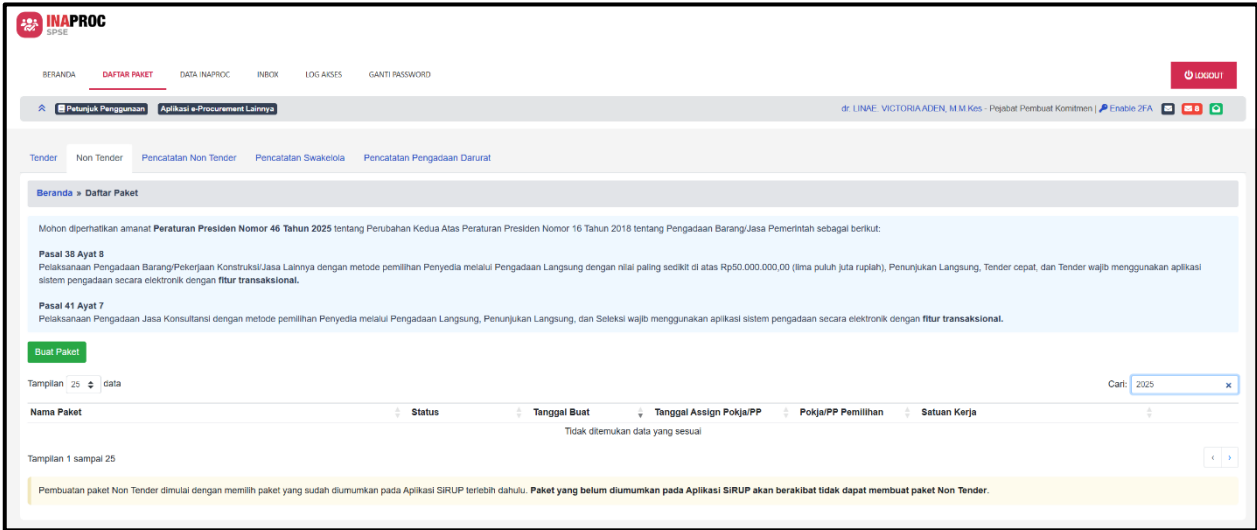
Berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat melampirkan dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti dukung, karena data dan/atau dokumen yang diminta tidak terdapat dan/atau tidak berada dalam penguasaan Dinas dalam bentuk dan rangkaian dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam instrumen monitoring/evaluasi.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kondisi arsip dan dokumen yang tersedia serta berada dalam penguasaan Dinas pada saat surat pernyataan ini dibuat. Apabila di kemudian hari ditemukan data/dokumen yang relevan dan berada dalam penguasaan Dinas, maka data/dokumen tersebut akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dokumen dan keterbukaan informasi publik.

Bersama surat ini kami lampirkan tangkapan layar SPSE dan daftar paket pada e-Katalog LKPP Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:



Paket Tender



Paket Non tender



Pencatatan Non Tender

